

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Infrastruktur merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatnya perekonomian suatu negara maupun kota. Apabila infrastruktur jalan dalam kondisi baik, maka akan maju suatu perekonomian sebuah kota, namun apabila infrastruktur jalan tidak baik, maka perekonomian pun akan berdampak pula tidak baik. Tersedianya akses transportasi yang layak dan baik sangat berperan untuk lancarnya arus lalu lintas. Meningkatnya perkembangan lalu lintas akibat pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan permasalahan yang signifikan jika tidak diimbangi dengan perbaikan kualitas dari infrastruktur jalan yang tersedia. Pertumbuhan transportasi yang sangat pesat berpengaruh pada padatnya lalu lintas, sehingga diperlukan adanya perbaikan jalan yang menunjang pada tingkat kualitas yang baik dan berstandar.

Penyediaan infrastruktur berupa jalan dan jembatan merupakan salah satu tugas pemerintah daerah sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (3), negara bertanggung jawab atas penyediaan umum yang layak. Undang-undang No. 38 Tahun 2004 juga menyebutkan bahwa, jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam menjalankan perannya tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan

Permukiman (PUPKP) Kabupaten Bener Meriah sebagai instansi yang menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Pendelegasian wewenang tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan publik agar tetap optimal mengingat banyaknya tugas pemerintah daerah selain menyelenggarakan pelayanan publik.

Meningkatnya aktivitas dalam kehidupan sosial masyarakat, peranan jalan akan semakin meningkat pula, saat ini jalan bukan hanya untuk mempermudah pergerakan orang, barang dan jasa melainkan berkaitan juga dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapainya 2 keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional, sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor : 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Jalan dan Penilikan disebutkan Pasal 1 bahwa Pemeliharaan jalan, pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan rutin berkala jalan, dan rehabilitasi jalan. Pasal 23 menyebutkan tentang penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota. Pasal 25 menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pemeliharaan jalan, peran masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) adalah peran serta orang atau instansi sepanjang tidak merugikan kepentingan umum. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir

(output) yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih (Yulianti & Hasanah,2018).

Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang diatur oleh rakyat dan apakah pelayanan publik mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga Eksekutif Pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. (Kumorotomo 2008:3)

Menurut Mardiasmo (2009:21) realisasi adalah proses menjadikan nyata, perwujudan, pelaksanaan yang nyata. Sedangkan menurut Nordiawan (2010:115) realisasi adalah proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa realisasi merupakan suatu proses yang harus diwujudkan dari perencanaan untuk menjadi kenyataan dan dalam proses tersebut dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula di dalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah ditetapkan.

Semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia harus

didukung oleh sarana prasarana jalan yang baik, aman dan nyaman. Keberadaan jalan raya yang menghubungkan antar wilayah sangat berperan sebagai jalur pendistribusian barang dan jasa melalui transportasi darat. Hal ini perlu mendapat perhatian kita semua sebagai sebuah kebutuhan yang dapat dikatakan dasar. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk kelima terbanyak di Asia Tenggara, sedikit banyaknya telah mengalami peningkatan dalam intensitas aktivitas sosial ekonomi seiring dengan kemajuan ekonomi yang telah terjadi.

Aktivitas masyarakat seiring dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat di suatu wilayah merupakan faktor utama pembangkit kebutuhan perjalanan yang memerlukan adanya tingkat efisiensi, keamanan, serta kenyamanan dalam perjalanan. Peningkatan jumlah pergerakan yang terjadi juga akan menuntut kualitas maupun kuantitas prasarana penunjang yang seimbang.



Gambar 1.1. Lokasi Desa Pantan Pediangen Jalan Lintas Kabupaten Bener Meriah

(Sumber Postingan Rilis Media @AJNN 02 April 2024)

Berdasarkan gambar diatas menjelaskan bahwa, dari Observasi awal yang dilakukan dilokasi penelitian dengan melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman beserta Kabid dan staf yang berkaitan dengan Penelitian ini.

Peneliti menemukan informasi dari Dinas terkait, dari beberapa permasalahan terkait keluhan masyarakat terhadap jalan yang masih banyak rusak, dari hal itu bahwasanya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman telah mengupayakan untuk penyelesaian terkait jalan yang dikeluhkan banyak masyarakat seperti telah mengusulkan 10 Jalan kabupaten Bener Meriah dengan Jumlah Rp. 141.060.000.000 (Seratus empat puluh satu miliar enam puluh juta rupiah) yang akan dibangun Program untuk Peningkatan Jalan Tahun 2023 pengusulan pada tahun 2022, dari pengusulan tersebut ternyata dari jumlah Usulan yang terealisasi hanya 4 (tiga) titik dengan jumlah anggaran Rp. 38.378.000.450 (Tiga puluh delapan milliard tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh rupiah) yang di setujui dari 10 (sepuluh) yang dan telah dikerjakan saat ini.

Dari observasi peneliti bersama Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjelaskan bahwa masih banyaknya yang belum terealisasi diakibat kurangnya anggaran yang ada. Anggaran yang saat ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dan kalau berharap penuh pada anggaran APBK Bener Meriah kemungkinan akan lambatnya pembangunan jalan yang menjadi keluhan masyarakat banyak, maka dari itu dinas terkait terus mengusulkan kepada kementerian PUPP RI untuk membantu pembangunan jalan dikabupaten Bener Meriah Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam tentang **“Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dalam Peningkatan Pembangunan Jalan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2022-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dalam Peningkatan Pembangunan Jalan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2022-2023?
2. Apa faktor yang menghambat Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam pelaksanaana Peningkatan Pembangunan Jalan Kabupaten Bener Meriah?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi fokus penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dalam Peningkatan Pembangunan Jalan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2022-2023.
2. Hambatan-hambatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam pelaksanaana Peningkatan Pembangunan Jalan Kabupaten Bener Meriah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Perumahan

dan Kawasan Pemukiman Dalam Peningkatan Pembangunan Jalan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2022-2023.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam pelaksanaan Peningkatan Pembangunan Jalan Kabupaten Bener Meriah?

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan yang kemudian dapat menjadi pembelajaran terkait teori yang didapatkan, sehingga menjadi gambaran ketika memasuki dunia kerja nanti.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian penelitian selanjutnya, serta dapat menjadi acuan bagi perkembangan anggaran Negara terhadap pengelolaan infrastruktur serupa.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya dan Universitas pada umumnya.